



Analisis Efektivitas Organisasi Internasional dalam Perspektif Administrasi Publik Global dengan Menggunakan Studi Literatur

Biyana Mahesa Albianazwa¹, Hana Nurlaeli², Siti Nurul Falah³, Samratul Goniya⁴, Damai Sakinah⁵, Jaliludin Muslim⁶

¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: biyanmahesa01@gmail.com¹, hananurlaeli3@gmail.com², nurullfalahhh01@gmail.com³, niasamratulgoniyah@gmail.com⁴, damaissakinahh@gmail.com⁵, jaliludin@uinsgd.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received May 13, 2026

Revised June 12, 2026

Accepted June 14, 2026

Keywords:

International Organizations, Global Public Administration, Organizational Effectiveness, SLR.

ABSTRACT

International Organizations (OIs) are currently facing the challenge of complexity in managing cross-border global issues that demand high administrative effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of international organizations through the lens of global public administration using the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol. An analysis was conducted on reputable literature in the period 2010-2025 to identify the determinants of OI performance. The findings of the study show that the effectiveness of OI is no longer determined only by formal hierarchical structures, but rather by institutional flexibility and orchestration capabilities in a global governance network involving state and non-state actors. The conclusion of the study confirms that the transformation of OI into an adaptive and network-based actor is key in facing the dynamics of future global crises.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 13, 2026

Revised June 12, 2026

Accepted June 14, 2026

Keywords:

Organisasi Internasional, Administrasi Publik Global, Efektivitas Organisasi, SLR.

ABSTRACT

Organisasi Internasional (OI) saat ini menghadapi tantangan kompleksitas dalam mengelola isu global lintas batas yang menuntut efektivitas administratif yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas organisasi internasional melalui lensa administrasi publik global dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA. Analisis dilakukan terhadap literatur bereputasi dalam rentang waktu 2010-2025 untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kinerja OI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas OI tidak lagi hanya ditentukan oleh struktur hierarkis formal, melainkan oleh fleksibilitas kelembagaan dan kemampuan orkestrasi dalam jaringan tata kelola global yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Simpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi OI menjadi aktor yang adaptif dan berbasis jaringan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika krisis global di masa depan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Biyana Mahesa Albianazwa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: biyanmahesa01@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, interdependensi antarnegara telah meningkat secara signifikan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan. Perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, serta meningkatnya mobilitas manusia dan barang telah mempercepat keterhubungan antarnegara, sehingga batas-batas geografis menjadi semakin kabur. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan global tidak lagi dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara saja. Isu-isu seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, ketidakstabilan ekonomi internasional, hingga konflik keamanan transnasional menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Dalam konteks ini, organisasi internasional hadir sebagai mekanisme penting dalam memfasilitasi koordinasi dan kerja sama global melalui pembentukan aturan, norma, serta kebijakan bersama (Casini, 2010; Coen, Kreienkamp, Tokhi, & Pegram, 2022).

Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi antarnegara, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan global. Melalui berbagai instrumen seperti regulasi, program kerja, serta mekanisme monitoring, organisasi internasional mampu mempengaruhi perilaku negara dan mendorong terciptanya kerja sama yang lebih terstruktur. Dalam banyak kasus, organisasi internasional juga berperan sebagai mediator dalam konflik internasional serta sebagai penyedia solusi terhadap permasalahan global yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan organisasi internasional menjadi elemen kunci dalam sistem tata kelola global (*global governance*) yang melibatkan berbagai aktor lintas negara (Coen et al., 2022).

Namun demikian, meskipun peran organisasi internasional semakin meningkat, efektivitasnya dalam mendorong kerja sama global masih menjadi perdebatan yang signifikan dalam literatur akademik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa organisasi internasional mampu meningkatkan koordinasi kebijakan serta mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional melalui penyediaan informasi dan mekanisme kerja sama yang terinstitusionalisasi. Organisasi internasional juga dinilai mampu menciptakan stabilitas dalam sistem internasional dengan menetapkan aturan dan standar yang diikuti oleh negara anggota. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat berbagai kritik yang menunjukkan bahwa organisasi internasional seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan akibat keterbatasan kapasitas, konflik kepentingan antarnegara, serta lemahnya mekanisme implementasi kebijakan (Lall, 2017).

Variasi dalam tingkat efektivitas organisasi internasional menunjukkan bahwa tidak semua organisasi memiliki kemampuan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan global. Faktor-faktor seperti desain institusional, kapasitas organisasi, serta tingkat legitimasi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja organisasi internasional. Organisasi yang memiliki legitimasi tinggi cenderung lebih efektif dalam memperoleh dukungan dari negara anggota maupun aktor non-negara, sehingga lebih mampu mendorong kerja sama global. Sebaliknya, organisasi dengan legitimasi yang rendah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Panke, Polat, & Hohlstein, 2022).



Sebagian besar kajian mengenai organisasi internasional selama ini didominasi oleh perspektif hubungan internasional yang berfokus pada aspek politik dan kekuasaan. Pendekatan ini cenderung melihat organisasi internasional sebagai instrumen negara atau sebagai arena interaksi antarnegara dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing. Meskipun pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik global, namun terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana organisasi internasional beroperasi secara internal sebagai entitas administratif. Aspek-aspek seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, serta kapasitas birokrasi seringkali kurang mendapat perhatian dalam analisis hubungan internasional.

Dalam konteks ini, pendekatan administrasi publik menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami organisasi internasional, khususnya melalui konsep *international public administration*. Pendekatan ini memandang organisasi internasional sebagai bentuk birokrasi global yang memiliki struktur, prosedur, serta mekanisme kerja yang kompleks. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat negara, tetapi juga sebagai institusi administratif yang memiliki otonomi tertentu dalam menjalankan fungsi kebijakan dan mempengaruhi proses *governance* global. Dengan demikian, efektivitas organisasi internasional tidak hanya ditentukan oleh faktor politik, tetapi juga oleh faktor administratif yang berkaitan dengan tata kelola organisasi (Bauer, Knill, & Eckhard, 2017; Knill & Bauer, 2016).

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas organisasi merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta legitimasi. Efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga berdasarkan bagaimana organisasi tersebut mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Legitimasi menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas organisasi internasional, karena berkaitan dengan tingkat penerimaan dan kepercayaan dari aktor-aktor yang terlibat. Organisasi internasional yang memiliki legitimasi tinggi cenderung lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak (Steffek, 2015).

Selain itu, peran birokrasi internasional juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas organisasi internasional. Aktor administratif dalam organisasi internasional memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan melalui berbagai mekanisme administratif. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang dapat mempengaruhi arah kebijakan melalui keahlian, informasi, serta strategi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika internal organisasi, khususnya dalam hal birokrasi, merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam analisis efektivitas organisasi internasional (Ege, Bauer, & Wagner, 2021).

Dalam konteks *global governance*, organisasi internasional beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi, implementasi kebijakan, serta pengambilan keputusan. Efektivitas organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola hubungan antaraktor serta mengatasi konflik kepentingan yang muncul. Selain itu, kapasitas institusional dalam merancang dan melaksanakan kebijakan juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi internasional dalam mencapai tujuannya (Biermann & Bauer, 2004).

Konsep *global administrative law* juga memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas organisasi internasional, khususnya dalam hal tata kelola dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, serta *rule of law* menjadi elemen



penting dalam meningkatkan legitimasi dan kinerja organisasi internasional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Casini, 2010).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas organisasi internasional dari berbagai perspektif, masih terdapat kesenjangan dalam literatur, khususnya terkait integrasi antara perspektif hubungan internasional dan administrasi publik. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek politik dan kekuasaan, sementara aspek administratif yang berkaitan dengan tata kelola dan kapasitas organisasi belum banyak dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner yang mampu menggabungkan kedua perspektif tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai organisasi internasional (Moloney & Rosenbloom, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi internasional merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif teoritis. Faktor administratif, seperti desain organisasi, kapasitas birokrasi, serta mekanisme tata kelola, memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor politik dalam menentukan kinerja organisasi internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas organisasi internasional dalam mendorong kerja sama global dengan menggunakan perspektif administrasi publik.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana efektivitas organisasi internasional dalam mendorong kerja sama global, faktor administratif apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut, serta bagaimana hubungan antara tata kelola global dan kinerja organisasi internasional dapat dijelaskan melalui perspektif administrasi publik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap berbagai studi sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian organisasi internasional dengan mengintegrasikan perspektif administrasi publik, serta memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas organisasi internasional melalui perbaikan tata kelola dan kapasitas administratif.

TINJAUAN LITERATUR

Organisasi Internasional (IO) menjadi pilar utama administrasi publik global dengan mengelola isu lintas batas seperti perdamaian, kesehatan, dan perdagangan melalui kerjasama negara anggota. Di era globalisasi, IO seperti PBB, Bank Dunia, dan WTO mendorong reformasi administrasi publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan.

IO memfasilitasi negosiasi perjanjian internasional, penyelesaian sengketa, dan bantuan teknis bagi negara anggota. Mereka membentuk norma global yang mempengaruhi kebijakan publik nasional, seperti standar perdagangan WTO atau program kesehatan WHO. Fungsi ini mencakup pengembangan institusi kuat dan peningkatan kualitas layanan publik melalui kolaborasi antarnegara.

Globalisasi menuntut IO beradaptasi dengan krisis seperti perubahan iklim, pandemi, dan migrasi, yang melebihi kapasitas nasional. Tantangan utama termasuk ketergantungan pada negara kuat, ancaman siber, dan ketidaksetaraan digital dalam *e-governance*. Reformasi seperti digitalisasi dan AI membantu IO mengatasi ini dengan meningkatkan akses layanan dan analisis data.



IO membuka peluang inovasi melalui teknologi seperti big data dan blockchain untuk keputusan berbasis bukti. Kerjasama ini memperkuat governance global, mendorong negara mengadopsi praktik terbaik administrasi publik. Pendekatan adaptif ini memastikan IO tetap relevan dalam menghadapi dinamika internasional yang terus berubah.

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil. Pendekatan ini mendorong organisasi publik untuk mengadopsi praktik manajemen sektor swasta, seperti pengukuran kinerja, transparansi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2021).

Dalam konteks organisasi internasional, prinsip NPM terlihat dari penerapan sistem evaluasi program, pelaporan kinerja, serta manajemen berbasis hasil. Hal ini bertujuan agar organisasi internasional dapat bekerja lebih efisien dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada negara anggota.

Namun, penerapan NPM pada organisasi internasional tidak selalu berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kepentingan antarnegara yang membuat pengukuran kinerja menjadi tidak sepenuhnya objektif. Selain itu, fokus pada hasil jangka pendek terkadang kurang memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan global.

New Public Governance (NPG)

New Public Governance (NPG) menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi melibatkan banyak aktor. Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2015), aktor tersebut bisa berasal dari sektor swasta, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional.

Pendekatan ini relevan dengan organisasi internasional karena cara kerjanya memang berbasis jaringan dan kerja sama antaraktor. Organisasi internasional tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak di tingkat global. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan membangun kerja sama.

Namun, pendekatan ini cenderung terlalu ideal. Dalam kenyataannya, kerja sama antarnegara tidak selalu berjalan lancar. Perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan bahkan ideologi sering menjadi hambatan. Artinya, meskipun NPG menekankan kolaborasi, tidak semua kolaborasi benar-benar bisa berjalan efektif.

Konsep Governance dan Global Governance

Governance merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana urusan publik dikelola dengan melibatkan berbagai pihak. Nugroho (2020) menyatakan bahwa governance tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Nurhidayat (2023) menambahkan bahwa good governance mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

Dalam konteks global, konsep ini berkembang menjadi *global governance*, yaitu sistem pengelolaan masalah dunia tanpa adanya satu kekuasaan utama. Organisasi internasional berperan sebagai penghubung dan koordinator antarnegara dalam sistem ini.

Masalahnya, karena tidak ada kekuasaan yang benar-benar mengikat, kebijakan yang dihasilkan sering bergantung pada kemauan negara anggota. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan tidak selalu konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep governance terlihat ideal, praktiknya di tingkat global masih memiliki banyak keterbatasan.



Global Administrative Law (GAL)

Global Administrative Law (GAL) melihat bahwa pengelolaan organisasi internasional perlu didasarkan pada aturan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Hastri et al. (2025) menjelaskan bahwa hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional.

Dalam pendekatan ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, organisasi internasional tidak hanya dinilai dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dijalankan.

Namun, semakin banyak aturan yang diterapkan, proses pengambilan keputusan cenderung menjadi lebih lambat dan kompleks. Dalam situasi tertentu, kondisi ini dapat menghambat respons cepat terhadap masalah global. Oleh karena itu, muncul dilema antara menjaga akuntabilitas dan mempertahankan efektivitas organisasi.

Konsep Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi merupakan salah satu konsep penting dalam menilai kinerja suatu organisasi. Siagian menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Robbins (2007) menekankan bahwa efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Secara umum, efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan, tetapi juga dari bagaimana proses pencapaian tersebut berlangsung. Organisasi yang efektif tidak hanya mampu mencapai hasil, tetapi juga mampu mengelola sumber daya, menjalankan fungsi organisasi, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Dalam perkembangannya, efektivitas organisasi dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Hal ini berarti bahwa efektivitas tidak dapat diukur dengan satu indikator saja, melainkan mencakup berbagai aspek, seperti pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan keberlanjutan kinerjanya.

Jika dikaitkan dengan organisasi internasional, efektivitas memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan organisasi pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan kewenangan, serta lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dalam organisasi internasional memerlukan pendekatan yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu.

Dengan demikian, efektivitas organisasi dapat dipahami sebagai konsep yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal serta didukung oleh proses yang berjalan secara baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menganalisis efektivitas organisasi internasional dalam perspektif administrasi publik global. Metode SLR dipilih karena dianggap mampu memberikan sintesis yang sistematis dan komprehensif terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan identifikasi pola kesenjangan penelitian (research gap), serta pengembangan kerangka konseptual yang lebih kuat (Capolupo, Piscopo, & Annarumma, 2019). SLR merupakan metode yang banyak digunakan dalam studi administrasi publik modern karena mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan teoritis dan empiris secara terstruktur (Licsandru,



2024). Selain itu, metode ini juga membantu mengurangi bias dalam pemilihan literatur melalui prosedur yang sistematis dan terstandarisasi (Valle-Cruz, 2024).

Penelitian ini mengadopsi desain Systematic Literature Review berbasis protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). PRISMA merupakan standar internasional yang digunakan untuk memastikan transparansi dan replikasi dalam proses review literatur. Dari beberapa penelitian, penggunaan PRISMA dalam penelitian Administrasi publik telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas seleksi artikel, meminimalkan bias, serta memastikan kelengkapan data (Amrulloh, Akbar, & Fathya, 2025).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari database akademik bereputasi, yaitu diantaranya Google Scholar, dan juga Scopus melalui indeks artikel yang dimana dalam pemilihan database ini didasarkan pada cakupan literatur yang luas dalam bidang administrasi publik dan hubungan internasional (Marques, Carvalho, & Pereira, 2021). Strategi pencariannya dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “*international organization*”, “*international public administration*”, “*global governance*”, “*organizational effectiveness*”, “*public administration*”. Penggunaan kombinasi kata kunci ini bertujuan untuk menangkap literatur yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas organisasi internasional dalam perspektif administrasi publik (Mountasser, 2023).

Penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kualitas akademik yang tinggi serta relevan dengan fokus kajian. Kriteria inklusi mencakup artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi (*peer-reviewed*), diterbitkan dalam rentang waktu 2010 hingga 2025, serta tersedia dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Selain itu, artikel yang dipilih harus memiliki keterkaitan langsung dengan topik organisasi internasional, tata kelola global, atau administrasi publik, serta memuat pembahasan mengenai efektivitas organisasi, kinerja institusi, atau mekanisme *governance*.

Di sisi lain, kriteria eksklusi diterapkan untuk menyaring literatur yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Artikel yang bersifat non-akademik seperti opini, laporan populer, atau publikasi yang tidak melalui proses peer-review dikeluarkan dari analisis. Selain itu, studi yang tidak memiliki akses teks lengkap (*full text*) juga tidak disertakan, karena dapat menghambat proses analisis mendalam. Literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan perspektif administrasi publik juga dieliminasi untuk menjaga fokus penelitian tetap konsisten. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil kajian, sebagaimana disarankan dalam penelitian *systematic review* di bidang administrasi publik (Enang, 2020).

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang dirancang untuk memastikan transparansi dan sistematisasi dalam pemilihan artikel. Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi literatur melalui pencarian menggunakan kata kunci yang telah ditentukan pada database akademik. Proses ini menghasilkan sejumlah besar artikel yang kemudian dikompilasi sebagai kumpulan data awal.

Selanjutnya, dilakukan tahap penyaringan (*screening*) dengan menelaah judul dan abstrak dari setiap artikel. Pada tahap ini, artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian secara langsung dieliminasi. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (*eligibility*), di mana artikel yang telah lolos penyaringan awal dianalisis secara lebih mendalam melalui pembacaan penuh (*full text*). Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian artikel dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Tahap akhir adalah inklusi, yaitu pemilihan artikel yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui tahapan ini, penelitian



memperoleh kumpulan literatur yang benar-benar relevan dan berkualitas. Pendekatan PRISMA ini telah banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena mampu meningkatkan transparansi serta mengurangi bias dalam proses seleksi literatur (Sienkiewicz & Maciej, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan thematic analysis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dalam literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan tahap pengkodean (*coding*), di mana setiap artikel diklasifikasikan berdasarkan karakteristik utama seperti teori yang digunakan, pendekatan penelitian, serta fokus pembahasan. Selanjutnya, dilakukan proses kategorisasi untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan penelitian. Tema-tema tersebut meliputi efektivitas organisasi internasional, tata kelola global, peran birokrasi internasional, serta faktor-faktor administratif yang mempengaruhi kinerja organisasi. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola umum yang muncul dalam literatur.

Tahap terakhir adalah sintesis, yaitu integrasi berbagai temuan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya merangkum hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga membandingkan, mengkritisi, dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengembangkan kontribusi teoretis dalam studi administrasi publik, khususnya dalam konteks organisasi internasional (Sienkiewicz-małjurek, 2025).

Untuk menjamin kualitas hasil penelitian, dilakukan berbagai upaya dalam menjaga validitas dan reliabilitas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mengumpulkan literatur dari berbagai jurnal dan penerbit yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam serta mengurangi potensi bias. Selain itu, transparansi metodologis juga dijaga melalui penggunaan protokol PRISMA yang memungkinkan proses penelitian dapat dilacak dan direplikasi oleh peneliti lain. Setiap tahapan dalam proses seleksi dan analisis literatur dijelaskan secara sistematis sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian. Replikasi prosedur menjadi salah satu indikator penting dalam penelitian berbasis SLR, karena memungkinkan hasil penelitian diuji kembali dalam konteks yang berbeda. Pendekatan ini telah diakui dalam berbagai studi sebagai metode yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi dalam penelitian sosial dan administrasi publik (Glor, 2021).

Meskipun metode *Systematic Literature Review* menawarkan berbagai keunggulan, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah ketergantungan pada literatur yang tersedia, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dan cakupan studi sebelumnya. Selain itu, terdapat kemungkinan bias publikasi, di mana penelitian dengan hasil signifikan lebih cenderung dipublikasikan dibandingkan dengan penelitian yang tidak menunjukkan hasil yang kuat. Keterbatasan lain berkaitan dengan akses terhadap database, di mana tidak semua artikel dapat diakses secara penuh, sehingga berpotensi membatasi jumlah literatur yang dianalisis. Namun demikian, penggunaan protokol PRISMA serta kriteria seleksi yang ketat diharapkan dapat meminimalkan dampak dari keterbatasan tersebut. Pendekatan ini tetap dianggap sebagai metode yang robust dalam menghasilkan sintesis literatur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Literatur

Berdasarkan hasil kajian literatur dalam lima tahun terakhir, efektivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola yang



kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Organisasi internasional tidak lagi hanya mengandalkan sistem birokrasi tradisional, tetapi juga menekankan kerja sama antaraktor dalam proses governance global.

Osborne, Powell, Cui, & Strokosch (2021) menjelaskan bahwa paradigma *public service ecosystem* menempatkan organisasi publik sebagai bagian dari jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor lainnya dalam menciptakan nilai publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam membangun partisipasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, Sommerer, Squatrito, Tallberg, & Lundgren (2022) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi internasional juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan sistem pengambilan keputusan organisasi. Organisasi internasional yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang jelas, adaptif, dan partisipatif cenderung lebih efektif dalam menjalankan fungsi governance global.

Dengan demikian, literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh kualitas governance, kapasitas birokrasi, kolaborasi antaraktor, serta sistem pengambilan keputusan organisasi dalam menghadapi tantangan global.

Faktor Efektivitas Organisasi Internasional

1. Struktur dan Kapasitas Kelembagaan

Efektivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi organisasi. Sommerer et al. (2022) menjelaskan bahwa organisasi internasional yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik cenderung lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan global. Kapasitas kelembagaan tersebut mencakup pembagian tugas yang terorganisasi, profesionalisme birokrasi, serta kemampuan organisasi dalam merespons perubahan internasional secara cepat dan adaptif.

2. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas organisasi internasional. Tallberg et al. (2018) menjelaskan bahwa legitimasi dan efektivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan serta keterlibatan negara anggota dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sistem pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan publik dan negara anggota terhadap organisasi internasional.

3. Kerja Sama dan Kolaborasi Antaraktor

Efektivitas organisasi internasional juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun kerja sama lintas aktor. Osborne et al. (2021) menjelaskan bahwa governance modern menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan nilai publik. Dalam konteks organisasi internasional, kolaborasi antaraktor menjadi faktor penting dalam penyelesaian isu global yang kompleks.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam meningkatkan legitimasi organisasi internasional. Grimmelikhuijsen & Feeney (2017) menjelaskan bahwa organisasi publik yang menerapkan transparansi dan sistem akuntabilitas yang baik cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dalam organisasi internasional,



pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi bagian penting untuk menjaga efektivitas governance global.

5. Adaptasi terhadap Perubahan Global

Perubahan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan krisis kesehatan internasional menuntut organisasi internasional untuk lebih adaptif. Avant & Westerwinter (2016) menjelaskan bahwa organisasi internasional yang mampu menyesuaikan kebijakan dan tata kelola terhadap dinamika global akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi koordinasi internasional dan menjaga stabilitas governance global.

Peran Birokrasi & Governance

Birokrasi dalam organisasi internasional memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, pengelola administrasi, serta penghubung antarnegara anggota dalam proses governance global. Dalam organisasi internasional, birokrasi tidak hanya berfungsi menjalankan aturan administratif, tetapi juga berperan dalam proses koordinasi, implementasi kebijakan, dan penyelesaian masalah internasional secara kolektif. Sommerer et al. (2022) menjelaskan bahwa kapasitas birokrasi dan sistem kelembagaan yang terorganisasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan organisasi internasional.

Dalam perspektif governance modern, organisasi internasional tidak lagi bekerja secara sentralistik dan hierarkis, melainkan mengedepankan kolaborasi serta partisipasi berbagai aktor. Osborne et al. (2021) menjelaskan bahwa tata kelola publik modern menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan nilai publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam membangun jaringan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.

Selain itu, perkembangan konsep governance menunjukkan adanya perubahan dari model *government* menuju *governance* yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dalam konteks organisasi internasional, perubahan tersebut mendorong birokrasi untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan global. Dengan demikian, birokrasi dan governance memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menciptakan organisasi internasional yang efektif dan mampu menghadapi dinamika global.

Analisis Teori

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan orientasi pada hasil dalam pengelolaan organisasi publik. Menurut Mardiasmo (2021), pendekatan NPM mendorong organisasi publik untuk mengadopsi praktik manajemen sektor swasta, seperti pengukuran kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan utama pendekatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih profesional dan berorientasi pada hasil kerja organisasi.

Dalam konteks organisasi internasional, prinsip-prinsip NPM terlihat melalui penerapan sistem evaluasi program, pelaporan kinerja, audit organisasi, serta penerapan manajemen berbasis hasil (*result-based management*). Organisasi internasional dituntut untuk mampu menunjukkan efektivitas penggunaan sumber daya dan mempertanggungjawabkan program yang dijalankan kepada negara anggota maupun masyarakat internasional. Oleh karena itu,



berbagai organisasi internasional mulai menerapkan indikator kinerja, target program, dan sistem evaluasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.

Penerapan NPM juga mendorong organisasi internasional untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi dan efisiensi administrasi. Melalui pendekatan ini, organisasi internasional berupaya mengurangi proses birokrasi yang terlalu panjang agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk menjaga legitimasi organisasi di mata publik internasional.

Namun, penerapan NPM dalam organisasi internasional tidak selalu berjalan optimal. Kompleksitas kepentingan antarnegara menyebabkan pengukuran kinerja organisasi internasional tidak sepenuhnya objektif. Setiap negara anggota memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi yang berbeda sehingga standar keberhasilan suatu kebijakan sering kali dipersepsikan secara berbeda pula. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi efektivitas organisasi internasional menjadi lebih kompleks dibandingkan organisasi publik nasional.

Selain itu, orientasi NPM yang terlalu berfokus pada hasil jangka pendek terkadang kurang memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan global. Dalam beberapa kasus, organisasi internasional lebih menekankan pencapaian target administratif dibandingkan keberlanjutan kebijakan yang dijalankan. Akibatnya, efektivitas organisasi tidak hanya bergantung pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam menjaga stabilitas kerja sama global dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pendekatan NPM memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme organisasi internasional. Namun, penerapannya tetap menghadapi berbagai tantangan akibat kompleksitas hubungan internasional dan perbedaan kepentingan antarnegara anggota.

New Public Governance (NPG)

New Public Governance (NPG) menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi melibatkan banyak aktor dalam proses governance. Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2015), aktor tersebut dapat berasal dari sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, maupun organisasi internasional. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi dan jaringan kerja sama sebagai unsur utama dalam tata kelola publik modern.

Pendekatan NPG sangat relevan dengan organisasi internasional karena organisasi internasional pada dasarnya bekerja melalui sistem jaringan dan kerja sama global. Organisasi internasional tidak memiliki kekuasaan absolut seperti negara sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi antaraktor. Dalam praktiknya, organisasi internasional berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan global seperti konflik internasional, perubahan iklim, kemiskinan, kesehatan global, dan isu kemanusiaan.

Melalui perspektif NPG, efektivitas organisasi internasional tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai tujuan organisasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam membangun partisipasi dan hubungan kerja sama yang berkelanjutan. Semakin kuat jaringan kerja sama yang dibangun, maka semakin besar peluang organisasi internasional dalam menjalankan fungsi governance global secara efektif.

Namun, pendekatan NPG juga memiliki berbagai keterbatasan. Dalam praktik internasional, kerja sama antarnegara tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan



kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Negara maju dan negara berkembang sering memiliki prioritas kebijakan yang berbeda sehingga proses pengambilan keputusan global menjadi lebih sulit mencapai konsensus.

Selain itu, tidak semua aktor memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama dalam proses governance global. Negara-negara besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam governance global sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan antaraktor. Oleh karena itu, meskipun NPG menekankan kolaborasi dan partisipasi, implementasinya di tingkat global masih menghadapi banyak hambatan dalam menciptakan kerja sama yang benar-benar setara dan efektif.

Dengan demikian, pendekatan NPG membantu menjelaskan bahwa efektivitas organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun jaringan kerja sama global. Akan tetapi, efektivitas tersebut tetap dibatasi oleh kompleksitas hubungan internasional dan perbedaan kepentingan antaraktor global.

Konsep Governance dan Global Governance

Konsep *governance* menjelaskan bagaimana urusan publik dikelola dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa *governance* merupakan proses pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Nurhidayat (2023) menyatakan bahwa *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam tata kelola publik.

Dalam perkembangannya, konsep *governance* berkembang menjadi *global governance*, yaitu sistem pengelolaan masalah dunia melalui kerja sama antarnegara dan organisasi internasional tanpa adanya satu otoritas utama yang mengendalikan seluruh sistem global. Dalam sistem ini, organisasi internasional berfungsi sebagai penghubung, fasilitator, dan koordinator antarnegara dalam menyelesaikan berbagai persoalan global.

Konsep *global governance* menjadi penting karena berbagai masalah internasional seperti perubahan iklim, pandemi, konflik global, dan krisis ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang melibatkan banyak aktor dalam proses pengambilan kebijakan global.

Namun, praktik *global governance* juga menghadapi berbagai tantangan. Karena tidak ada kekuasaan tunggal yang benar-benar mengikat seluruh negara, implementasi kebijakan global sering bergantung pada kemauan politik negara anggota. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan internasional sering berjalan tidak konsisten dan sulit diterapkan secara merata di semua negara.

Selain itu, perbedaan kepentingan nasional sering menyebabkan proses negosiasi internasional berlangsung lama dan kompleks. Negara anggota cenderung lebih mengutamakan kepentingan domestik dibandingkan kepentingan global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep *governance* terlihat ideal dalam teori, implementasinya di tingkat global masih menghadapi keterbatasan dalam menciptakan tata kelola internasional yang efektif.

Dengan demikian, konsep *governance* dan *global governance* menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam



membangun koordinasi, partisipasi, dan kerja sama antaraktor global di tengah perbedaan kepentingan internasional.

Global Administrative Law (GAL)

Global Administrative Law (GAL) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya aturan hukum dan prosedur administratif dalam pengelolaan organisasi internasional. Hastri et al. (2025) menjelaskan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional agar proses governance global dapat berjalan secara tertib dan akuntabel.

Dalam pendekatan GAL, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan legalitas menjadi prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan organisasi internasional. Organisasi internasional tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan GAL juga menekankan bahwa organisasi internasional harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi organisasi internasional di mata negara anggota dan masyarakat global. Dengan adanya aturan administratif yang jelas, proses governance internasional diharapkan menjadi lebih transparan dan adil.

Namun, penerapan GAL juga menimbulkan tantangan tersendiri. Semakin banyak aturan dan prosedur administratif yang diterapkan, maka proses pengambilan keputusan cenderung menjadi lebih lambat dan kompleks. Dalam situasi tertentu seperti krisis kesehatan global atau konflik internasional, proses birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat respons cepat organisasi internasional terhadap permasalahan global.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema antara menjaga akuntabilitas dan mempertahankan efektivitas organisasi internasional. Di satu sisi, organisasi internasional membutuhkan aturan administratif yang jelas agar proses kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, organisasi juga membutuhkan fleksibilitas agar mampu merespons tantangan global secara cepat dan efektif.

Dengan demikian, pendekatan GAL menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh kualitas proses administrasi dan tata kelola organisasi internasional.

Konsep Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi merupakan konsep penting dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (2023) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan organisasi sesuai target yang telah direncanakan. Sementara itu, Robbins & Judge (2006) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Secara umum, efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, tetapi juga dari bagaimana proses pencapaian tujuan tersebut berlangsung. Organisasi yang efektif tidak hanya mampu menghasilkan output yang baik, tetapi juga mampu



mengelola sumber daya, menjalankan fungsi organisasi, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara optimal.

Dalam perkembangannya, efektivitas organisasi dipahami sebagai konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek seperti pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, efektivitas organisasi tidak dapat diukur hanya melalui satu indikator saja.

Jika dikaitkan dengan organisasi internasional, efektivitas organisasi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan organisasi pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antarnegara, keterbatasan kewenangan organisasi internasional, serta dinamika lingkungan global yang terus berubah. Organisasi internasional juga tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksa negara anggota menjalankan kebijakan yang telah disepakati.

Akibatnya, pengukuran efektivitas organisasi internasional memerlukan pendekatan yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan formal organisasi. Efektivitas organisasi internasional juga harus dilihat dari kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi global, menjaga kerja sama antaraktor, serta merespons berbagai tantangan internasional secara adaptif.

Dengan demikian, efektivitas organisasi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal, tata kelola yang baik, serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan global.

Sintesis dan *Gap* Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur, efektivitas organisasi internasional merupakan konsep multidimensional yang dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kualitas *governance*, legitimasi organisasi, serta kemampuan membangun kolaborasi antaraktor global. Literatur menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak lagi hanya bekerja melalui model birokrasi hierarkis tradisional, tetapi telah berkembang menuju sistem *governance* berbasis jaringan yang melibatkan negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi non-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *New Public Governance* (NPG) yang menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam tata kelola publik global (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Di sisi lain, pendekatan *New Public Management* (NPM) menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional juga dipengaruhi oleh efisiensi birokrasi, pengukuran kinerja, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil (Mardiasmo, 2021). Organisasi internasional dituntut tidak hanya mampu membangun kerja sama global, tetapi juga harus mampu menunjukkan efektivitas penggunaan sumber daya dan keberhasilan program yang dijalankan. Oleh karena itu, efektivitas organisasi internasional tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif teoritis, melainkan merupakan kombinasi antara efisiensi administratif dan kemampuan *governance* kolaboratif.

Selain itu, konsep *governance* dan *global governance* menjelaskan bahwa organisasi internasional berperan sebagai penghubung dan koordinator dalam pengelolaan isu global lintas negara (Nugroho, 2020; Nurhidayat, 2023). Namun, praktik *governance* global masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan politik antarnegara, lemahnya komitmen implementasi kebijakan, serta ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan



keputusan internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, tetapi juga oleh dinamika hubungan politik global.

Sementara itu, pendekatan *Global Administrative Law* (GAL) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam proses administrasi organisasi internasional (Hastri et al., 2025). Akan tetapi, semakin kompleksnya prosedur administratif sering kali menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, terutama dalam menghadapi krisis global yang membutuhkan respons cepat. Dengan demikian, organisasi internasional menghadapi dilema antara menjaga akuntabilitas dan mempertahankan efektivitas organisasi.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, ditemukan adanya research gap dalam kajian efektivitas organisasi internasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas organisasi internasional dari perspektif hubungan internasional dan politik global, terutama terkait legitimasi, kekuasaan, dan kerja sama antarnegara. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif administrasi publik, khususnya mengenai kapasitas birokrasi, tata kelola organisasi, dan efektivitas administrasi internasional, masih relatif terbatas (Moloney & Rosenbloom, 2020b) .

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung membahas konsep NPM, NPG, governance, dan GAL secara terpisah. Padahal, efektivitas organisasi internasional dalam praktiknya dipengaruhi oleh keterkaitan antara efisiensi birokrasi, kolaborasi governance, serta kualitas administrasi global secara bersamaan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara komprehensif mengkaji efektivitas organisasi internasional melalui integrasi berbagai perspektif administrasi publik global. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas organisasi internasional melalui pendekatan administrasi publik global yang mengintegrasikan konsep NPM, NPG, *governance*, dan *Global Administrative Law* (GAL). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana organisasi internasional membangun efektivitas organisasi di tengah kompleksitas governance global dan dinamika hubungan internasional modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi internasional dalam perspektif administrasi publik global telah mengalami pergeseran paradigma dari model birokrasi hierarkis menuju pendekatan tata kelola berbasis jaringan yang lebih adaptif. Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, tingkat keberhasilan suatu organisasi internasional saat ini tidak lagi hanya diukur melalui pencapaian output formal, melainkan melalui kemampuannya menjalankan peran sebagai orkestrator yang mampu menyinergikan berbagai kepentingan aktor global. Efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas kelembagaan dalam merespons dinamika isu lintas batas, kualitas koordinasi antarjaringan kebijakan, serta adanya dukungan komitmen politik yang konsisten dari negara-negara anggota. Dengan demikian, birokrasi internasional berfungsi sebagai elemen kunci dalam memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel guna menciptakan nilai publik di tingkat global.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa poin rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak terkait. Pertama, organisasi internasional diharapkan dapat



melakukan reformasi administratif yang lebih inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam jaringan birokrasi global. Kedua, negara anggota perlu meningkatkan komitmen politik dan sinkronisasi kebijakan domestik dengan standar internasional guna memastikan bahwa program-program yang telah disepakati dapat terimplementasi secara efektif di tingkat lokal.

Terakhir, bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian ini melalui penelitian empiris dengan metode studi kasus pada organisasi internasional spesifik yang sedang menghadapi tantangan tata kelola nyata, seperti WHO atau WTO. Hal ini penting dilakukan untuk menguji validitas kerangka teoritis mengenai orkestrasi dan fleksibilitas kelembagaan dalam praktik administrasi publik global yang lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, A. A., Akbar, R. S., & Fathya, V. N. (2025). Trend Of Public Service Application Acceptance Analysis : A Systematic Review Using The Prisma Approach. 31(1).
- Avant, D., & Westerwinter, O. (2016). *The new power politics: Networks and transnational security governance*. Oxford University Press.
- Bauer, M. W., Knill, C., & Eckhard, S. (2017). International Public Administration: A New Type of Bureaucracy? Lessons and Challenges for Public Administration Research. *International Bureaucracy*, (78), 179–198. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94977-9_8
- Biermann, F., & Bauer, S. (2004). Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics. *Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions - Global Environ Change*, 14, 189–193. [https://doi.org/10.1016/S0959-3780\(03\)00025-6](https://doi.org/10.1016/S0959-3780(03)00025-6)
- Capolupo, N., Piscopo, G., & Annarumma, C. (2019). Value co-creation and co-production in the interaction between citizens and public administration: A systematic literature review. *Kybernetes*, 49(2), 313–331. <https://doi.org/10.1108/K-07-2018-0383>
- Casini, B. K. and L. (2010). *Global Administrative Law Dimensions of International Organizations Law*. (10).
- Coen, D., Kreienkamp, J., Tokhi, A., & Pegram, T. (2022). Making global public policy work: A survey of international organization effectiveness. *Global Policy*, 13(5), 656–668. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13125>
- Ege, J., Bauer, M. W., & Wagner, N. (2021). How do international bureaucrats affect policy outputs? Studying administrative influence strategies in international organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 737–754. <https://doi.org/10.1177/00208523211000109>
- Enang, I. (2020). Identifying influencing factors of sustainable public service transformation : a systematic literature review. <https://doi.org/10.1177/0020852319896399>
- Glor, E. D. (2021). Can the PRISMA Protocol be used to Guide a Systematic Literature Review of Antecedents of Policy Innovation Trailblazing and Adoption ? – I. 26(2), 1–21.
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Feeney, M. K. (2017). Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments. *Public Administration Review*, 77(4), 579–590.
- Hastri, E. D., Huda, M., Yuza, E., Milia, J., Itasari, E. R., Miano, M. R. R., ... Kamilah, A. (2025). *Hukum Internasional Era Society 5.0*. Mega Press Nusantara
- Knill, C., & Bauer, M. W. (2016). Policy-making by international public administrations: concepts, causes and consequences. *Journal of European Public Policy*, 23(7), 949–959. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1168979>



- Lall, R. (2017). Beyond Institutional Design: Explaining the Performance of International Organizations. *International Organization*, 71(2), 245–280. <https://doi.org/10.1017/S0020818317000066>
- Mardiasmo, (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Marques, I., Carvalho, A., & Pereira, D. (2021). Public Administration and Values Oriented to Sustainability : A Systematic Approach to the Literature.
- Moloney, K., & Rosenbloom, D. H. (2020). Creating Space for Public Administration in International Organization Studies. *American Review of Public Administration*, 50(3), 227–243. <https://doi.org/10.1177/0275074019888498>
- Mountasser. (2023). Digital Transformation In Public Administration : A Systematic Literature Review Article history : Keywords : Digital Transformation ; Public Administration ; Systematic Literature Review ; Digital Transformation in Public Administration : A Systematic Li. 1–27.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy 6-Edisi Revisi. Elex Media Komputindo.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Osborne, S. P., Powell, M., Cui, T., & Strokosch, K. (2021). New development: ‘Appreciate–Engage–Facilitate’—The role of public managers in value creation in public service ecosystems. *Public Money & Management*, 41(8), 668–671.
- Panke, D., Polat, G., & Hohlstein, F. (2022). Who performs better? A comparative analysis of problem-solving effectiveness and legitimacy attributions to international organizations1. *Cooperation and Conflict*, 57(4), 433–456. <https://doi.org/10.1177/00108367211036916>
- Mardiasmo (2021). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
- Purwanto & Sulistyastuti (2015). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia.
- Robbins, S. P. (2007). Perilaku Organisasi. Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2006). Perilaku Organisasi, PT. Indeks, Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Siagian, S. (2023). Manajemen sumber daya manusia. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Sienkiewicz, K., & Maciej, M. (2024). Understanding public service supply chain management : a systematic literature review. In *Management Review Quarterly* (Vol. 74). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00350-8>
- Sienkiewicz-małyjurek, K. (2025). Digital Technologies in Public Administration Networks : Systematic Literature Review and Research Avenues. <https://doi.org/10.1177/00953997251369090>
- Sommerer, T., Squatrito, T., Tallberg, J., & Lundgren, M. (2022). Decision-making in international organizations: institutional design and performance. *The Review of International Organizations*, 17(4), 815–845.
- Steffek, J. (2015). The output legitimacy of international organizations and the global public interest. *International Theory*, 7(2), 263–293. <https://doi.org/10.1017/S1752971915000044>
- Tallberg, J., Sommerer, T., Squatrito, T., & Lundgren, M. (2018). The performance of international organizations: a policy output approach. In *Governance by International Public Administrations* (pp. 129–148). Routledge.
- Valle-Cruz. (2024). Artificial intelligence in the public sector: A PRISMA-based review.